

**PENGARUH ENTREPRENEURSHIP TERHADAP PENANGGULANGAN
PENGANGGURAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PALEMBANG**

Helisia Margahana
STIE Trisna Negara

ARTICLE INFO

Keywords: *Entrepreneurship, Empowerment, Unemployment Mitigation*

ABSTRACT: *Entrepreneurship is a social phenomenon that has grown rapidly in efforts to solve and overcome various social problems, such as economic improvement and poverty alleviation and unemployment. This study aims to describe the role of community empowerment and entrepreneurship in building a community economy that has implications for unemployment reduction. In tackling unemployment cannot be carried out only on the basis of commitment and determination, desire for responsibility, obsession of opportunity, tolerance of risk, ambiguity, and uncertainty, self-confidence, creativity and flexibility, desire for direct feedback, high energy, motivation to excel, future orientation, willingness to learn from failure, and leadership abilities, but must be accompanied by providing entrepreneurial skills, entrepreneurial opportunities, marketing orientation and networking from the community itself. So that the target of unemployment reduction will be achieved, namely the creation of employment opportunities, increased community income, and social cohesion and inclusive economic growth. Based on the conclusions, some suggestions can be given including increasing the number of social entrepreneurial actors who play an active role in improving the economic community in order to reduce unemployment and poverty. The role and cooperation with the government in combating unemployment is highly expected and more evident in its implementation.*

Kata Kunci : Kata kunci: Entrepreneurship, Pemberdayaan, Penanggulangan Pengangguran

ABSTRAK: Kewirausahaan merupakan fenomena sosial yang telah tumbuh dengan cepat dalam upaya menyelesaikan dan menanggulangi berbagai masalah sosial, seperti perbaikan ekonomi dan pengentasan kemiskinan serta pengangguran. Penelitian ini bertujuan menggambarkan peran pemberdayaan masyarakat dan entrepreneurship dalam membangun ekonomi masyarakat yang berimplikasi pada penanggulangan pengangguran. Dalam penanggulangan pengangguran tidak dapat dilaksanakan hanya berdasarkan komitmen dan tekad, keinginan untuk tanggung jawab, obsesi kesempatan, toleransi terhadap risiko, ambiguitas, dan ketidakpastian, kepercayaan diri, kreativitas dan fleksibilitas, keinginan untuk umpan balik langsung, energi tingkat tinggi, motivasi untuk unggul, orientasi ke masa depan, kesediaan untuk belajar dari kegagalan, dan kemampuan kepemimpinan, namun harus dibarengi dengan pemberian keterampilan wirausaha, entrepreneur opportunities, orientasi pemasaran serta *networking* dari masyarakat itu sendiri. Sehingga akan tercapai sasaran dari penanggulangan pengangguran yaitu terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kohesi sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berdasarkan kesimpulan dapat diberikan beberapa saran diantaranya memperbanyak pelaku kewirausahaan sosial yang berperan aktif mendorong perbaikan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan masyarakat. Peran dan kerjasama dengan pemerintah dalam upaya penanggulangan pengangguran sangat diharapkan dan lebih nyata dalam pelaksanaannya.

Corresponding author:
Helisia Margahana
helisia.tn@gmail.com

Hasil wawancara terhadap informan menyatakan setuju bahwa resep elektronik dapat meningkatkan keselamatan pasien.

Pendahuluan

Latar Belakang

Di Indonesia masalah kemiskinan dan pengangguran masih menjadi topik utama. Berbagai program sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya. Dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia harus dilakukan menggunakan pendekatan multi disiplin, dimana dimensi pemberdayaan harus menjadi yang utama.

Pengangguran dan kemiskinan merupakan permasalahan yang mendasar dalam pembangunan ekonomi, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran saat ini masih bersifat terpusat, sehingga program-program yang dijalankan belum atau tidak sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat atau daerah tertentu. Program-program pengentasan kemiskinan dan pengangguran saat ini masih menempatkan masyarakat sebagai objek dan bukan subjek, sehingga masyarakat kurang aktif serta kurang berpartisipasi dalam menggali potensi yang dimilikinya. Selain itu program yang dijalankan masih bersifat sektoral hal ini sering kali mengakibatkan adanya kebijakan yang tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Fenomena pengangguran banyak terjadi di perkotaan dikarenakan sudah sedikitnya kesempatan kerja. Sedangkan pengangguran untuk di wilayah pedesaan cenderung lebih rendah, tetapi hal ini memperlihatkan bahwa setengah dari pengangguran itu terjadi di wilayah perkotaan. Pengangguran terjadi karena adanya suatu kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja. Dengan kata lain, jumlah yang mencari pekerjaan lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia. Pengangguran adalah mereka yang mencari pekerjaan, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Kondisi kesempatan kerja penuh tercapai bila semua tenaga kerja yang mencari pekerjaan telah mendapatkan pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Jadi pengangguran merupakan seseorang yang sudah memasuki usia kerja namun belum mempunyai pekerjaan, ataupun sedang mencari pekerjaan. Sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya penumpukan angkatan kerja, yang mana akan menyebabkan banyak terjadi kriminalitas

Membahas kemiskinan tidak bisa lepas tentang pengangguran. terdapat hubungan yang kuat antara kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan juga pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia menilai bahwa untuk dapat memajukan ekonomi secara substansial, pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan public yang efektif dengan cara menjalin kemitraan dengan sector swasta dan organisasi masyarakat sipil (World Bank, 2014). Pemerintah dapat melakukan banyak hal untuk menyelesaikan masalah sosial karena kemampuannya dalam mengakses dan mengelola sumber daya. Namun, dalam kenyataannya tidak demikian, dikarenakan ada beberapa alasan mendasar, diantaranya: tidak efisien dalam bertindak, rentan terhadap tindak korupsi, berkutut dengan birokrasi, serta adanya kepentingan individual yang selalu melekat.

Berdasarkan berita online CNN Indonesia (Senin, 06/05/2019) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2019 ada di angka 5,01 persen dari tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia. Angka ini membaik dibanding dengan posisi Februari 2018 yakni 5,13 persen. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan tren angka TPT pada Februari setiap tahunnya menunjukkan penurunan. Pada Februari 2019 jumlah pengangguran berkurang sebanyak 50 ribu orang dari 6,87 juta orang pada Februari 2018 menjadi 6,82 juta orang. Meskipun demikian, angka pengangguran terbuka di kota sebesar 6,3 persen masih lebih tinggi dibandingkan dengan di desa yakni 3,45 persen.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara konsisten untuk menumbuhkembangkan kesadaran diri masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan yaitu membentuk individu dan masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud adalah kemandirian dalam hal berpikir, bertindak, dan mengendalikan perbuatan yang mereka lakukan.

Kewirausahaan sosial dapat dijadikan sebagai salah satu metode pembelajaran untuk pendidikan karakter. Mereka kemudian memberikan saran untuk menjadikan mata pelajaran kewirausahaan sosial sebagai salah satu metode dalam pembentukan karakter para mahasiswa. Penelitian yang serupa dilakukan oleh Muliadi Palesangi (2011) dengan judul Pemuda Indonesia dan Kewirausahaan Sosial. Hasil penelitian menyimpulkan kewirausahaan sosial merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi masalah sosial diantaranya pengangguran, kemiskinan dan kerusakan lingkungan (Penny Rahmawati, 2012)

Kewirausahaan sosial relatif lebih baru dalam perkembangannya dibandingkan kewirausahaan bisnis (Margahana, 2019). Dengan banyaknya kegiatan pengembangan kewirausahaan dalam pendidikan dimana hanya

fokus pada perguruan tinggi dalam menyiapkan lulusan yang mampu berwirausaha sehingga tidak sampai menganggur, namun kini bisa mencakup dunia pendidikan yang lebih dini, dengan demikian citra kewirausahaan lebih terlihat menonjol daripada wirausaha sosial. Pengembangan kewirausahaan sebagai sebuah disiplin ilmu, sehingga Philip Wickham, mengartikannya sebagai tahapan remaja. Dengan demikian, kewirausahaan sosial dapat terapkan pada fase yang lebih dini, misalnya yakni pada tahapan anak di bawah lima tahun.

Di Indonesia wirausaha sosial tumbuh dengan cepat seiring dengan keyakinan bahwa kewirausahaan sosial dapat mengatasi masalah-masalah sosial terutama kemiskinan dan pengangguran. (Utomo, 2014). Upaya menyelesaikan permasalahan sosial yang terkait dengan kemiskinan dan pengangguran dapat melalui upaya pendekatan kewirausahaan. Hal ini sudah banyak dibuktikan oleh berbagai praktik kewirausahaan sosial. Kajian kewirausahaan sosial telah banyak dilakukan dalam menganalisis praktik kewirausahaan sosial. Diantaranya studi yang dilakukan oleh Rahmawati et al (2011), Palesangi (2012), Situmorang (2012), Pratiwi (2014), Utomo (2014), Sutiko (2010), Firdaus (2014), Maisaroh (2011), Indriyatni (2015), Wispandono (2014), Okoli (2013), Darwanto (2012), Sukhemi (2019), Shefiu (2016), Gamede (2018), dan Wardiansyah (2016).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh entrepreneurship terhadap penanggulangan pengangguran yang dimoderasi oleh pemberdayaan masyarakat?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh entrepreneurship terhadap penanggulangan pengangguran yang dimoderasi oleh pemberdayaan masyarakat.

TINJAUAN TEORETIS

Entrepreneurship

Konsep *Entrepreneur* sosial merupakan perluasan dari konsep dasar kewirausahaan yang secara historis telah diakui sebagai pengangkat ekonomi, terutama dalam menyelesaikan masalah sosial (Noruzi, 2010), (Patra, 2014). *Entrepreneur* merupakan serangkaian perilaku individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi melalui upaya pemanfaatan berbagai peluang untuk dapat menciptakan nilai.

Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti peluang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung (Margahana, 2019). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya (Rusdiana, 2014).

Entrepreneur adalah orang yang mendirikan, mengelola, mengembangkan dan melembagakan perusahaannya atau kemampuannya untuk melihat dan menilai adanya kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan tepat dan mengambil keuntungan dalam meraih sukses (Gitosardjono, 2013). Kewirausahaan adalah orang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya (Fahmi, 2014).

Entrepreneur muncul karena beberapa alasan pertama, karena ketidakmampuan Negara dalam menyelesaikan permasalahan sosial karena implementasi kebijakan yang seringkali tidak efektif. Kedua, ketidakmandirian organisasi secara keuangan untuk membiayai aktivitas organisasinya. Ketiga, memberika berbagai bentuk pelayanan public, justru terkendala masalah in-efisiensi (Jiao, 2011).

Entrepreneurship (kewirausahaan) berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) No. 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan membudayakan entrepreneur adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar (Winarno, 2011).

Menurut M Scarborough dan Thomas dalam Kementerian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (2010) karakteristik sikap dan perilaku kewirausahaan meliputi: (1) commitment and determination, (2) desire for responsibility, (3) opportunity obsession, (4) tolerance for risk, ambiguity, and uncertainty, (5) self confidence, (6) creativity and flexibility, (7) desire for immediate feedback, (8) high level of energy, (9) motivation to excel, (10) orientation to the future, (11) willingness to learn from failure, and (12) leadership ability.

Kewirausahaan sosial menjadi fenomena sangat menarik saat ini karena perbedaan-perbedaannya dengan wirausaha tradisional yang hanya fokus terhadap keuntungan materi dan kepuasan pelanggan, serta signifikansinya terhadap kehidupan masyarakat. Perhatian kewirausahaan sosial secara global mendapatkan momentumnya ketika Muhammad Yunus mendapatkan hadiah Nobel perdamaian tahun 2006 karena memelopori pengembangan kredit mikro dan bisnis sosial melalui gramen bank (Jain Vijay, 2012).

Kewirausahaan sosial adalah pemanfaatan perilaku kewirausahaan yang lebih berorientasi untuk pencapaian tujuan sosial dan tidak mengutamakan perolehan laba, atau laba yang diperoleh dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Menurut Rhenald (2008), banyak orang bicara tentang wirausaha, namun mereka belum paham. Saat ini banyak mentor yang mengajarkan kewirausahaan dengan cara cepat kaya. Padahal dalam kewirausahaan sosial hal yang menjadi pegangan yakni misi sosial, produk atau servis yang ditukar, dan keuntungan yang dicari didistribusikan bukan untuk kepentingan diri sendiri, serta harus dapat mempertanggungjawabkan terhadap apa yang disalurkan. Dalam kewirausahaan sosial, tidak hanya orang kaya yang bisa berbagi. Disini, orang miskinpun bisa berbagi.

Penelitian tentang kewirausahaan sosial pernah dilakukan oleh Penny Rahmawati, dkk (2012) dengan judul "Pengembangan metode pembelajaran pendidikan karakter melalui kewirausahaan sosial (Sosiopreneurship)." Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial dapat dijadikan sebagai salah satu metode pembelajaran dalam pendidikan karakter. Sehingga melalui hasil penelitiannya peneliti memberikan saran bahwa untuk menjadikan mata pelajaran kewirausahaan sosial sebagai salah satu metode dalam pembentukan mahasiswa.

Kewirausahaan sosial merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah sosial berupa pengangguran, kemiskinan dan kerusakan lingkungan (Palesangi, 2012). Definisi komprehensif di atas memberikan pemahaman bahwa kewirausahaan sosial terdiri dari empat elemen utama yakni *social value*, *civil society*, *innovation*, and *economic activity* :

1. *Social Value*. Ini merupakan elemen paling khas dari kewirausahaan sosial yakni menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
2. *Civil Society*. Kewirausahaan sosial pada umumnya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat.
3. *Innovation*. Kewirausahaan sosial memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial.
4. *Economic Activity*. Kewirausahaan sosial yang berhasil pada umumnya dengan menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis.

Pengangguran

Pengangguran akan selalu ada di dalam perekonomian, dimana pada saat pengeluaran agregatnya lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan faktor-faktor produksi yang telah tersedia di dalam perekonomian untuk dapat menghasilkan barang-barang dan jasa (Prasaja, 2013). Pengangguran dilukiskan sebagai suatu keadaan adanya pengalihan sejumlah faktor tenaga kerja ke bidang lain yang akan mengurangi *output* keseluruhan tempat asal mereka bekerja (Jhingan, . 2014).

Salah satu alasan pengangguran selalu muncul di dalam pengangguran adalah pencarian kerja. Pencarian kerja adalah suatu proses seseorang untuk mencocokkan pekerja dengan pekerjaannya yang sesuai dengan bakat dan juga keterampilan sesuai yang dimilikinya (Mankiw N, 2012). Sementara itu Zurisdah seseorang dikatakan menganggur bila dia ingin bekerja dan telah berusaha mencari pekerjaan namun tidak mendapatkannya (Zurisdah, 2016).

Dalam ilmu kependudukan, orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Berdasarkan kategori usia, usia angkatan kerja adalah 15-64 tahun, tetapi tidak semua orang yang berusia 15-64 tahun dihitung sebagai angkatan kerja. Mengadopsi pendapat dari Perrini dan Austin konsep untuk

menanggulangi adanya pengangguran dengan memperhatikan dimensi-dimensi sebagai berikut: (1) keterampilan wirausaha, (2) entrepreneur opportunities, (3) orientasi pemasaran, dan (4) networking (Perrini, 2006), (Austin, 2006).

Definisi pengangguran menurut BPS pengangguran terbuka (*open unemployment*) didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Sedang pekerja yang digolongkan setengah penganggur (*underemployment*) adalah pekerja yang masih mencari pekerjaan penuh atau sambilan dan mereka yang bekerja dengan jam kerja rendah. Setengah penganggur sukarela adalah setengah penganggur tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Setengah penganggur terpaksa adalah setengah penganggur yang masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan. Pekerja digolongkan setengah penganggur parah (*severe underemployment*) apabila ia masuk setengah menganggur dengan jam kerja kurang dari 25 jam seminggu (Wardiansyah M, 2016).

a. Pengangguran dalam Sektor Informal

Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari kerja sesuai dengan aspirasi mereka. Aspirasi mereka biasanya adalah bekerja di sektor modern atau di kantor, untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka bersedia menunggu untuk beberapa lama, tidak tertutup kemungkinan mereka berusaha mencari pekerjaan itu di kota atau di provinsi atau daerah yang kegiatan industri telah berkembang. Hal ini menyebabkan angka pengangguran tinggi di perkotaan atau di daerah kegiatan industri atau sektor modern berkembang. Sebaliknya pengangguran terbuka rendah di daerah atau provinsi yang tumpu pada sektor pertanian. Hal tersebut penyediaan pekerjaan di sektor informal oleh sebab rendahnya pendidikan dan kurang menjamin kelangsungan hidup.

b. Pengukuran Tingkat Pengangguran

Badan statistik negara mengelompokkan orang dewasa pada setiap rumah tangga yang disurvei ke dalam satu kategori berikut.

1. Bekerja
2. Pengangguran
3. Tidak termasuk angkatan kerja

Setelah mengelompokkan seluruh individu yang disurvei ke dalam tiga kategori tersebut, badan statistik negara menghitung berbagai statistik untuk merangkum kondisi angkatan kerja. Angkatan kerja (*labor force*) adalah jumlah orang yang berkerja dan tidak berkerja.

Jenis-jenis pengangguran antara lain:

- a. Pengangguran normal Para Pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik.
- b. Pengangguran siklikal Pengangguran ini disebabkan karena terjadinya penurunan permintaan agregat yang mungkin disebabkan oleh penurunan harga komoditas, sehingga perusahaan akan mengurangi pekerja hal ini akan dapat menyebabkan terjadinya pengangguran.
- c. Pengangguran struktural Hal ini disebabkan oleh wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi yang mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran tinggi. Sehingga kegiatan produksi mengalami penurunan, dan sebagian pekerja diberhentikan.
- d. Pengangguran Teknologi Pengangguran ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia.

Kemudian terdapat beberapa jenis pengangguran berdasarkan cirri-cirinya antara lain:

1. Pengangguran terbuka Terjadinya pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Akibatnya dari perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Sehingga terjadi pengangguran secara nyata dan sepenuh waktu.
2. Pengangguran tersembunyi Dibanyak negara berkembang sering didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatan dengan efisien.

3. Pengangguran bermusim Pengangguran ini terdapat pada sektor pertanian dan perikanan, sesuai dengan musimnya. Pada musim hujan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau para pesawah tidak dapat mengerjakan tanahnya.
4. Setengah menganggur Ada seseorang yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua minggu, atau satu hingga empat jam sehari

Terdapat beberapa cara untuk mengatasi pengangguran antara lain:

Menciptakan penghasilan sendiri, salah satunya dengan mengubah bentuk benda yang tidak berguna menjadi bentuk yang lebih berguna bagi masyarakat. Hal ini akan memberikan nilai tambah atas hasil dari benda tersebut. Contohnya sampah merupakan benda yang tidak berguna. Namun jika sampah tersebut diubah, misalnya sampah daun diubah menjadi pupuk kompos dan pupuk tersebut dikemas pada kantong plastik dan siap dijual. Maka pupuk memiliki nilai tambah atas hasil sebesar harga jualnya.

Perlu pengembangan wirausaha Salah satunya melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dimana merupakan suatu lembaga yang berperan penting dalam memperdayakan tenaga-tenaga pada usia kerja yang masih menganggur menjadi tenaga yang produktif. Untuk mengurangi pengangguran Balai latihan kerja memberikan berbagai keterampilan dan keahlian, seperti pembekalan menjahit, salon, komputer, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Pemerintah Pemerintah sangat berperan dalam menanggulangi pengangguran. Dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan pada dasarnya tidak dapat diselenggarakan hanya oleh pemerintah saja, akan tetapi perlu partisipasi dari seluruh masyarakat. Salah satu sebagai contoh program pemerintah dalam mengatasi pengangguran yaitu dengan memberikan dana pembiayaan yang berasal dari pemerintah, pinjaman kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah semakin tertarik untuk membantu sektor-sektor usaha kecil. Selain itu perusahaan-perusahaan kecil dapat bergabung untuk memperoleh tender dari kontrak pemerintah. Pemerintah sadar bahwa perusahaan kecil harus mampu bersaing dengan perusahaan besar. Perusahaan kecil haruslah menunjukkan perhatiannya pada pemerintah, sebelum pemerintah dapat memberikan bantuan kepada perusahaan-perusahaan besar. Sayangnya, para pengusaha kecil biasanya enggan untuk mengorganisasi dan mengemukakan kebutuhan-kebutuhan mereka kepada pemerintah berharap adanya partisipasi para pengusaha sehingga pengangguran bisa dikurangi. Pemerintah sangat berharap hal ini dapat berkembang dengan pesat sehingga biarpun tidak bisa memberikan kesempatan kerja kepada semua pengangguran, minimal sebagian dari mereka dapat tertampung. Dan pemerintah menginginkan agar pengusaha dapat turut andil mendidik jiwa kewirausahaan dengan cara memberikan suatu bimbingan teknis dan permodalan kepada para pengangguran sehingga mereka tidak hanya memfokuskan diri untuk menjadi karyawan perusahaan atau menjadi pegawai negeri

Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamaya Eropa. Untuk memahami konsep *empowerment* secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya.

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Suharto, 2005). Pemberdayaan adalah suatu kegiatan berkesinambungan yang dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi (Suhendra, 2006).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat yang disebut *community self-reliance* atau kemandirian (Abu, 2008). Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif, solusi dari masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

Pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya (Hermansyah, 2013).

Berikut adalah 5 faktor yang biasa digunakan untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat:

1. Faktor keterampilan individu: hal ini merupakan dasar dari keberhasilan para wirausaha dan orang sering mengabaikannya, sehingga akhirnya banyak terjadi kegagalan. Pada sekolah bisnis saat ini disarankan seseorang mempunyai ide, fokus, mempunyai kejelasan, dan rencana bisnis yang baik dalam mencapai tujuan. Organisasi yang berhasil disatukan oleh motivasi, tekad, dan keberanian yang kuat.
2. Faktor keterampilan kesopanan: Bisnis yang sukses bukanlah dikarenakan produk atau layanannya, ketersediaan pasokan, atau budaya perusahaannya. Organisasi adalah sekelompok orang yang terikat bersama oleh tujuan dan visi yang sama. Rencana dan tujuan bisnis yang dirancang sangat baik tidak akan berhasil jika tidak dilaksanakan oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi tersebut.
3. Faktor keterampilan penghargaan: terus berupaya mencari karyawan terbaik di perusahaan. Sampaikan kritikan pada saat yang tepat, dan lebih fokus pada kesalahan untuk menjadikannya lebih baik pada masa yang akan datang, berikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Jadikan hal ini sebagai budaya sehingga hal ini akan mendorong pengembangan karyawan melalui pujian dan pengakuan.
4. Faktor keterampilan kreatif: Keterampilan kreatif akan mengajarkan karyawan bagaimana caranya menjadi lebih antusias dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Pendekatan cara ini kemungkinan tidak akan berhasil untuk diberlakukan pada semua organisasi, oleh karena itu keterampilan kreatif sangat penting untuk membangun kesuksesan yang bertahan lama dan memastikan layanan Anda memiliki keunggulan atas pesaing.
5. Faktor tidak perduli, lakukan saja apa yang menjadi tugas kita: untuk berhasil dalam organisasi, kita harus berani untuk mencoba. Berani memulai berarti siap dengan risiko besar yang akan dihadapi. Seorang pimpinan perlu tekad dan keyakinan untuk mengatasi rintangan dan hambatan dalam berbisnis. Kunci kesuksesan adalah kemampuan kita untuk mengambil resiko dan berani mencoba lagi.

Indikator pemberdayaan paling tidak memiliki empat hal, yaitu: (1) kegiatan yang terencana dan kolektif, (2) memperbaiki kehidupan masyarakat, (3) prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan (4) dilakukan melalui program peningkatan kapasitas. Sementara itu menurut Perrini (2006) dan Austin (2006) dimensi pemberdayaan meliputi: (1) penciptaan lapangan kerja, (2) peningkatan pendapatan masyarakat, dan (3) kohesi sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (Suharto, 2009).

Pemberdayaan masyarakat sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan (Munawar, 2011).

Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya berkaitan erat dengan sustainable development yang membutuhkan pra-syarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial yang selalu dinamis. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan. Konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Gerakan pembangunan yang dilakukan pemerintah secara essensial harus dibarengi dengan menggerakkan partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk kegiatan yang dilakukannya sendiri. Dengan demikian menjadi tugas yang sangat penting bagi menegemen pembangunan untuk menggerakkan, membimbing, menciptakan iklim yang

mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan masyarakat. Upayaupaya ini dilakukan melalui kebijaksanaan, peraturan dan kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat.

Konsep pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah nampaknya belum mampu menjawab tuntutan masyarakat yang menyangkut keadilan, pemerataan dan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga belum mengangkat sebagian penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat nampaknya tidak akan lepas dari pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai model pembangunan yang berdimensi rakyat. Berangkat dari kondisi itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pemerintah :

1. Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah” antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI”
2. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ditegaskan bahwa “ halhal yang mendasar dalam undangundang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat”
3. Mencermati kedua rumusan Kebijakan Pemerintah diatas dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah;
4. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social masyarakat, peningkatan kswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, social dan politik”
5. Dalam rangka mengemban tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat , Badan Pemberdayaan menetapkan visi, misi, kebijakan, strategi dan program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :
 - a. Visi Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat
 - b. Misi Pemberdayaan Masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian dan secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan, artinya untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan.

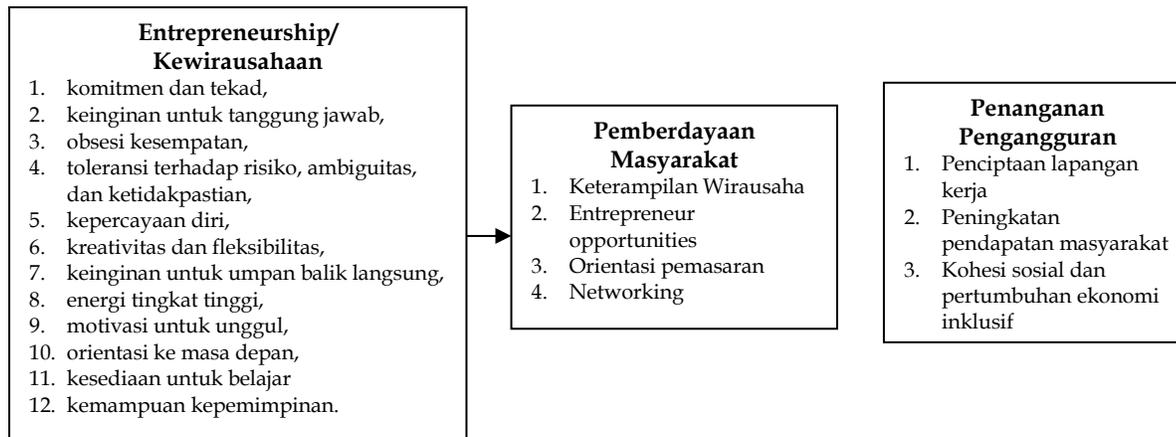
Berdasarkan pendapat ini pemberdayaan masyarakat adalah Noor Munawar (2011) konsep pembanguan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory. Dalam penelitiannya menyatakan upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dikaji dari tiga aspek: Pertama, *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga, *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan

dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai buaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan

Kerangka Penelitian

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli serta penelitian terdahulu dapat dibuat kerangka atau konsep penelitian sebagai berikut:



Sumber: Adaptasi dari Perrini dan Vurro (2006), Austin (2006)

Gambar 1. Kerangka atau Konsep Penelitian

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survey dengan kuesioner, yaitu suatu cara pengambilan data dengan memberikan daftar pertanyaan yang berisi aspek-aspek yang hendak diukur dan dijawab oleh responden penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk pemecahan masalah dengan menguraikan hasil jawaban kuesioner dari responden. Analisis statistik deskriptif merupakan suatu teknik analisis yang menggambarkan data-data yang telah terkumpul secara deskriptif sehingga tercipta sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

Analisis inferensial dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM) yang dioperasikan menggunakan program software Partial Least Square (PLS). PLS merupakan metode analisis yang powerful karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Misalnya, data tidak harus terdistribusi normal dan sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten.(Ghozali, 2015).

Objek Penelitian

Sebagai obyek dan subyek penelitian adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah di Palembang.

Teknik Pengambilan Sampel dan Data Penelitian

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan karakteristik tertentu dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam populasi penelitian.(Sekaran, 2017). Kecukupan sampel dalam penelitian ini mengacu pada teknik Maximum Likelihood Estimation yang membutuhkan sampel berkisar antara 100-200 sampel. Dalam penelitian ini menggunakan

sampel sebanyak 95 orang sampel penelitian. Skala dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan 5 bobot ukuran.(Ghozali, 2015).

Definisi Operasional

Variabel kewirausahaan dalam penelitian ini diukur dengan 12 item indikator: (1) komitmen dan tekad, (2) keinginan untuk tanggung jawab, (3) obsesi kesempatan, (4) toleransi terhadap risiko, ambiguitas, dan ketidakpastian, (5) kepercayaan diri, (6) kreativitas dan fleksibilitas, (7) keinginan untuk umpan balik langsung, (8) energi tingkat tinggi, (9) motivasi untuk unggul, (10) orientasi ke masa depan, (11) kesediaan untuk belajar, dan (12) kemampuan kepemimpinan.

Variabel pengangguran dalam penelitian ini diukur dengan 3 indikator, diantaranya: (1) penciptaan lapangan kerja, (2) peningkatan pendapatan masyarakat, dan (3) kohesi sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Variabel pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini diukur dengan 4 indikator, diantaranya: (1) keterampilan wirausaha, (2) entrepreneur opportunities, (3) orientasi pemasaran, dan (4) networking.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilaksanakan pada program pelatihan kewirausahaan untuk para pengangguran yang ada di Palembang. Penelitian dan Pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif dalam materi pembelajaran, media, strategi pembelajaran untuk digunakan di sekolah, bukan untuk menguji teori.

Menurut Borg dan Gall (2007), penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Hal ini berarti penelitian dan pengembangan cocok untuk menilai atau memverifikasi berbagai model pelatihan. Obyek Penelitian berada di Palembang, sedangkan lokasi penelitian terdiri dari 2 kecamatan yaitu di Kecamatan Belitang III, dan Kecamatan Semendawai Suku III.

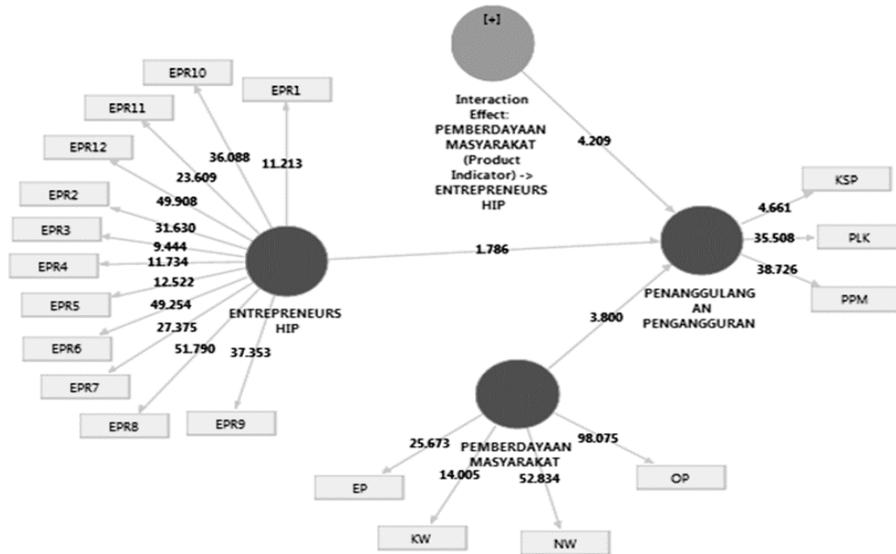
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling yaitu metode area sampling. Menurut Sukmadinata (2008) area sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi tersebar dalam berbagai wilayah. Pada penelitian pendahuluan, data dikumpulkan dengan metode wawancara dan observasi langsung. Pada proses pengembangan, data dikumpulkan dengan metode kuesioner dan wawancara langsung.

Data hasil survey melalui kuesioner diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM) yang dioperasikan menggunakan program software Partial Least Square (PLS). PLS merupakan metode analisis yang powerful karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Misalnya, data tidak harus terdistribusi normal dan sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten.(Ghozali, 2015)

Analisis dan Pembahasan

Analisis Data Penelitian

Pengukuran model variabel atau outer loading merupakan langkah untuk melihat validitas dan reliabilitas indikator atau instrument pada model penelitian. Suatu model dikatakan valid jika memiliki loading factor di atas 0,5, atau dengan kata lain loading factor yang lebih rendah dari 0,5 memiliki convergent validity yang rendah, sehingga harus di drop dari model penelitian. Sedangkan uji reliabilitas dilihat dari composite reliability (CR), jika CR nilainya lebih dari 0,7 menunjukkan bahwa nilai yang memuaskan, dan diperkuat lagi dengan nilai Cronbach's Alpha yang dipersyaratkan memiliki nilai di atas 0,6. Berikut ini adalah model setelah dilakukan kalkulasi dengan software Smart-PLS:



Gambar 2. Full Model Estimasi

Tabel 1. Outer Loading

Kode Indikator	Entrepreneurship	Pemberdayaan Masyarakat	Penanggulangan Pengangguran	Kesimpulan
EPR1	0.718	-	-	Valid
EPR2	0.857	-	-	Valid
EPR3	0.702	-	-	Valid
EPR4	0.740	-	-	Valid
EPR5	0.700	-	-	Valid
EPR6	0.900	-	-	Valid
EPR7	0.877	-	-	Valid
EPR8	0.920	-	-	Valid
EPR9	0.883	-	-	Valid
EPR10	0.887	-	-	Valid
EPR11	0.861	-	-	Valid
EPR12	0.907	-	-	Valid
EP	-	0.876	-	Valid
KW	-	0.802	-	Valid
NW	-	0.891	-	Valid
OP	-	0.938	-	Valid
KSP	-	-	0.567	Valid
PLK	-	-	0.913	Valid
PPM	-	-	0.919	Valid

Tabel 2. Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Variabel	Composite Reliability	Cronbach Alpha	Kesimpulan
Entrepreneurship	0.964	0.959	Reliabel
Pemberdayaan Masyarakat	0.931	0.902	Reliabel
Penanggulangan Pengangguran	0.852	0.739	Reliabel
Interaksi: Pemberdayaan Masyarakat → Entrepreneurship	0.989	0.988	Reliabel

Tabel 3. Path Coefficient

Variabel	Original Sample	Sample Mean	T Statistic	P Value
Entrepreneurship → Penanggulangan Pengangguran	0.239	0.266	1.786	0.075
Pemberdayaan Masyarakat → Penanggulangan Pengangguran	0.457	0.442	3.800	0.000
Interaksi: Pemberdayaan Masyarakat → Entrepreneurship → Penanggulangan Pengangguran	-0.534	-0.521	4.209	0.000

Berdasarkan tabel 1 di atas semua loading factor memiliki nilai lebih dari 0,5 sehingga dapat dikatakan sudah memenuhi convergen validity, yang berarti bahwa semua instrument dalam penelitian ini valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan berdasarkan tabel 3 menunjukkan nilai Composite Reliability dan Cronbach Alpha dari masing-masing variabel memiliki nilai composite reliability di atas 0,7 dan nilai cronbach alpha di atas 0,6 sehingga semua variabel penelitian adalah reliabel.

Selanjutnya berdasarkan pengukuran structural atau inner model untuk melihat hubungan antara variabel melalui proses bootstrapping, parameter uji t-statistik digunakan untuk memprediksi hubungan antar variabel, model structural dievaluasi dengan melihat tingkat signifikansi path coefficient yang didapat dari nilai t-statistic dan nilai standardized path coefficient. Batas nilai pengujian hipotesis yaitu nilai t muatan faktornya (loading factor) lebih besar dari nilai kritis ($>1,96$).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh entrepreneurship terhadap penanggulangan pengangguran dengan nilai t statistik sebesar $1.786 < 1,96$, atau p value sebesar $0.075 > 0.05$. Terdapat pengaruh antara pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan pengangguran dengan nilai t statistik sebesar $3.800 > 1,96$, atau p value sebesar $0.000 < 0.05$. Diketahui pula bahwa terdapat pengaruh entrepreneurship terhadap penanggulangan pengangguran yang dimoderasi oleh pemberdayaan masyarakat dengan nilai t statistik sebesar $4.209 > 1,96$, atau p value sebesar $0.000 < 0.05$.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penelitian ini menjadi sedikit berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah ada. Dalam penelitian ini akan dicari sebuah solusi permasalahan pengangguran yang mengusung spirit kewirausahaan melalui pemberdayaan yang cocok dengan potensi, minat, bakat, kemampuan, keahlian, dan ketrampilan para pemuda karang taruna di kabupaten Sampang.

Semangat kewirausahaan yang ditonjolkan dalam penelitian ini adalah model penanggulangan pengangguran berupa pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk adanya baik pelatihan maupun seminar-seminar

tentang kewirausahaan untuk masyarakat pengangguran yang ada di Palembang. Kenapa model penelitian ini dipilih dikarenakan selain masalah pengangguran, fakta lain yang ditemukan adalah mulai terkikisnya nilai-nilai lokal daerah pada kalangan generasi muda dan kurangnya sinergi antara perguruan tinggi pencetak sumber daya manusia terhadap kebutuhan para stakeholder menjadi permasalahan kompleks yang ditemukan di wilayah penelitian.

Salah satu alasan pengangguran selalu muncul di dalam pengangguran adalah pencarian kerja. Pencarian kerja adalah suatu proses seseorang untuk mencocokkan pekerja dengan pekerjaannya yang sesuai dengan bakat dan juga keterampilan sesuai yang dimilikinya. (Mankiw, 2012). Sementara itu Zurisdah (2016) seseorang dikatakan menganggur bila dia ingin bekerja dan telah berusaha mencari pekerjaan namun tidak mendapatkannya. Dalam ilmu kependudukan, orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja.

Salah satu usaha untuk mengurangi pengangguran adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya, (Muhtadi, 2009).

Pemberdayaan dalam penelitian ini diterjemahkan dari kata *Empowerment* yang mempunyai tiga pengertian, yaitu: menjadikan mampu, memberikan kesempatan, dan memberikan izin. Ketiga makna tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Menjadi mampu, memiliki makna segala daya dan upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat pengangguran yang ada di Palembang untuk bisa dan mampu menjadi dalam mengatasi persoalan yang setiap hari mereka rasakan. Segala daya dan upaya itu bisa diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pelatihan, pendidikan, supervisi, dan lain sebagainya. Adanya upaya pelatihan sebagai salah satu bentuk menjadikan masyarakat yang awalnya pengangguran bisa bisa keluar dan kemudian menjadikan dirinya berwirausaha mandiri atau kelompok.

Pengertian daripada pemberdayaan kedua adalah memberikan kesempatan. Dimana masyarakat yang menganggur bisa mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari pengangguran menjadi wirausahawan yang sukses. Salah satu yang harus mereka miliki adalah kemampuan atau keterampilan dalam berkomunikasi. Meningkatkan kemampuan dan potensi diri menjadi dasar pengembangan bakat kewirausahaan para masyarakat.

Dalam upaya memulai berwirausaha, diperlukan mengembangkan jejaring pada waktu awal, hal ini merupakan kunci permulaan yang penting dan harus dilakukan secara optimal. Jejaring formal maupun informal sangat diperlukan dalam mengembangkan bisnis wirausaha. Pengembangan jejaring memerlukan persyaratan keterampilan berkomunikasi yang baik dan efektif.

Pengertian ketiga dari pemberdayaan adalah memberikan izin. Pengertian ini menggambarkan kondisi pemberdayaan di lapangan. Pemberian izin disini adalah bahwa penggerak dari kegiatan pemberdayaan masyarakat di Palembang harus mempunyai pikiran untuk mengizinkan masyarakat atau pengangguran melakukan tindakan atau kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan keterampilan agar potensi mereka meningkat. Berdasarkan temuan penelitian ini, sebagian besar masyarakat pengangguran di wilayah Palembang memiliki minat yang besar di bidang wirausaha. Meskipun secara pribadi mereka memiliki berbagai macam hobi seperti olah raga, musik, namun mereka memiliki minat yang tinggi sebagai pengusaha dan berwirausaha.

Berdasarkan hasil dari analisis data dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh entrepreneurship terhadap penanggulangan pengangguran yang dimoderasi oleh pemberdayaan masyarakat di Palembang. Dimana hal ini sejalan dengan pendapat penelitian terdahulu diantaranya oleh Rahmawati et al (2011), Palesangi (2012), Situmorang (2012), Pratiwi (2014), Utomo (2014), Sutiko (2010), Firdaus (2014), Maisaroh (2011), Indriyatni (2015), Wispandono (2014), Okoli (2013), Darwanto (2012), Sukhemi (2019), Shefiu (2016), Gamede (2018), dimana pada umumnya hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa melalui pemberdayaan masyarakat dan pemberian pelatihan entrepreneurship dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Simpulan dan Saran

Simpulan Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel entrepreneur dan pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap penanggulangan pengangguran masyarakat di Palembang.

Dalam penanggulangan pengangguran masyarakat di Palembang tidak dapat dilaksanakan hanya berdasarkan indikator dari variabel entrepreneur diantaranya: komitmen dan tekad, keinginan untuk tanggung jawab, obsesi kesempatan, toleransi terhadap risiko, ambiguitas, dan ketidakpastian, kepercayaan diri, kreativitas dan fleksibilitas, keinginan untuk umpan balik langsung, energi tingkat tinggi, motivasi untuk unggul, orientasi ke masa depan, kesediaan untuk belajar dari kegagalan, dan kemampuan kepemimpinan, namun harus dibarengi dengan pemberian keterampilan wirausaha, entrepreneur opportunities, orientasi pemasaran serta networking yang merupakan indikator dari variabel pemberdayaan masyarakat. Sehingga akan tercapai sasaran dari penanggulangan pengangguran berupa terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kohesi sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah Palembang mempunyai keinginan yang kuat untuk memperoleh ilmu pengetahuan tentang kewirausahaan untuk meningkatkan minat serta keinginan mereka.

Keinginan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan kewirausahaan harus mendapat respon positif dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian izin untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan. Lebih dari itu, pemerintah daerah bisa mengupayakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan secara gratis dengan menggandeng instansi terkait seperti pemerintah atau dinas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan atau swasta. Kegiatan seperti ini perlu diwujudkan dengan melakukan kerjasama dalam bentuk *memorandum of understanding (MoU)* sehingga program-program pemberdayaan masyarakat di Palembang bisa direalisasikan. Kegiatan seperti ini tidak sulit untuk dijalankan karena Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan atau swasta memiliki program *corporate social of responsibility (CSR)* yang diarahkan untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian berbagai bantuan.

Dalam pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan yang berbasis rakyat, menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri. Dengan demikian menjadi tugas penting manajemen pembangunan untuk membimbing, mengarahkan dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranatapanata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat diberikan beberapa saran diantaranya memperbanyak pelaku kewirausahaan sosial yang berperan aktif mendorong perbaikan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan masyarakat. Peran dan kerjasama dengan pemerintah dalam upaya penanggulangan pengangguran sangat diharapkan dan lebih nyata dalam pelaksanaannya.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, diantaranya; peneliti tidak mempertimbangkan seluruh faktor yang mungkin mempengaruhi penanggulangan pengangguran dan mengasumsikan bahwa penanggulangan pengangguran hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor entrepreneurship dan pemberdayaan masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya bisa melakukan penelitian dengan mempertimbangkan lebih banyak lagi variabel yang diasumsikan mempunyai pengaruh terhadap penanggulangan pengangguran. Berikutnya subyek pada penelitian ini sangat terbatas sehingga tidak bisa digunakan untuk menggeneralisasi untuk lingkup yang lebih besar, mengingat keterbatasan waktu dan biaya. Jika memungkinkan penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan sampel yang lebih besar dengan karakteristik responden yang lebih beragam.

Daftar Pustaka

- Abu, H. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Austin, J. E. 2006. Three Avenues for Social Entrepreneurship Research. Dalam J. Mair, J. Robinson, and K. Hockerts (Ed.). *Social Entrepreneurship*, New York (USA): Palgrave Macmillan: 22-33.
- Fahmi, I. 2014. *Kewirausahaan Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung, Alfabeta.
- Ghozali 2015. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gitosardjono, S. S. 2013. *Wirausaha Berbasis Islam dan Kebudayaan*. Jakarta, Pustaka Bisnis Indonesia.
- Hermansyah, M. d. T. 2013. *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*. Jakarta, UIN Jakarta Press.
- Jain Vijay, a. K. R. 2012. Enhancing Innovation And Intellectual Property Culture In Manufacturing Small And Medium Enterprises. *African Journal of Business Management* 6(4): 1234-1243.
- Jhingan, M. L. . 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Jiao, H. 2011. A Conceptual Model for Social Entrepreneurship Directed Toward Social Impact on Society. *Social Enterprise Journal* 7(2): 130-149.
- Mankiw N, G. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta, Salemba Empat.
- Margahana, H. 2019. The Influence of Credibility and Voluntariness Toward technological use behaviour: Entrepreneurial potential Model approach. *International Journal of Entrepreneurship*.
- Margahana, H. 2019. Self Efficacy, Self Personality And Self Confidence On Entrepreneurial Intention: Study On Young Enterprises. *Journal of Entrepreneurship Education*.
- Munawar, N. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1(2): 87-99.
- Noruzi, M. R., J. H. Westover, and G. R. Rahimi 2010. An Exploration of Social Entrepreneurship in the Entrepreneurship Era. *Asian Social Science* 6(6): 3-10.
- Palesangi, M. 2012. Pemuda Indonesia dan Kewirausahaan Sosial. *Prosiding Seminar Nasional Competitive Advantage*, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum.
- Patra, S. K., and S. C. Nath 2014. Social Transformation Through Social Entrepreneurship: An Exploratory Study. *The IUP Journal of Entrepreneurship Development* XI(1): 7-17.
- Penny Rahmawati, S. H., dan Endarwati M Lies 2012. Pengembangan Metode Pendidikan Karakter Melalui Kewirausahaan Sosial (Sosiopreneurship). *Jurnal stieama.ac.id*.
- Perrini, F., and C. Vurro 2006. Social Entrepreneurship: Innovation and Social Change Across Theory and Practice., Dalam J. Mair, J. Robinso, and Hockerts (Ed.). *Social Entrepreneurship*, New York (USA): Palgrave Macmillan: 57-58.
- Prasaja, M. H. 2013. Pengaruh Investasi Asing, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2011. *Economics Development Analysis Journal* 2(3): 72-84.
- Rusdiana 2014. *Kewirausahaan Teori dan Praktik*. Bandung, : CV Pustaka Setia.
- Sekaran, U. d. R. B. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta Selatan, Salemba Empat.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung, Refika Aditama.
- Suharto, E. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung, PT. Renika Aditama.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, STKSPRESS.
- Wardiansyah M, Y., and Bahri Zainul 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran (Studi Kasus Provinsi se-Sumatera). *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan* 5(1): 13-18.
- Winarno 2011. *Pengembangan Sikap Entrepreneurship dan Intreprenurship*. Jakarta, PT Indeks.
- Zurisdah, Z. 2016. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal IAIN*. Sultan Maulan Hasanudin Banten, Serang.